

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peranan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini mempunyai peranan yang strategis dalam penyelenggaraan institusi. Hal ini disebabkan karena TI yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dibutuhkan dukungan tata kelola teknologi informasi guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

TI menjadi komponen kunci dalam tatakelola pemerintahan karena pengaruh sistem informasi dan teknologi yang menunjang setiap komponen organisasi dengan kata lain tata kelola TI yang baik mendukung terjadinya Good Corporate Governance (Juiz dkk., 2014). Kebutuhan akan tatakelola TI meningkat pada era globalisasi dimana Tata Kelola TI dalam praktiknya sangat penting untuk perubahan tata kelola pemerintahan (Choudhury dan Ahmed, 2002). Ketergantungan pada TI adalah karakteristik umum bagi hampir semua organisasi modern termasuk pemerintah.

Pemanfaatan tata kelola TI di organisasi pemerintah di tingkat pusat dan daerah akan memastikan peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik (Depkominfo, 2007). Tatakelola TI yang diterapkan pada organisasi pemerintahan dapat memberikan keuntungan yang positif dan mendukung tercapainya tujuan bisnis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penerapan Tatakelola TI yang baik adalah dengan menerapkannya sesuai dengan konteks institusi. Namun, mengatur informasi Teknologi (atau tata kelola TI) bukanlah tugas yang mudah karena diakui sebagai isu kritis yang dihadapi sektor publik saat ini (Al-Hatmi dan Hales, 2010).

Faktor-faktornya antara lain; kompleksnya hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah dan perlemen (legislatif) (Janahi dkk., 2015), faktor pengaruh politik dan perubahan struktural terutama berkaitan dengan Sektor publik yang dapat mengacaukan mekanisme pemerintahan (Alonso dkk., 2008). Siklus politik

berpengaruh terhadap struktur organisasi sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan prioritas program. Hal ini mengakibatkan diskontinuitas data dan melemahkan pemantauan tata pemerintahan (Bozeman dan Bretschneider, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi memainkan peran penting dalam IT Governance (Denise, 2010). Terlepas dari semua nuansa, Tata Kelola TI yang efektif mengambil peran penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial warga negara (Loukis dan Tsouma, 2002).

Tata kelola TI dapat diimplementasikan melalui kerangka struktur, proses, dan mekanisme relasional (Haes dan Gerembergen, 2004). Organisasi yang berbeda mungkin memerlukan kombinasi yang berbeda dari struktur, proses, dan mekanisme relasional yang berbeda (Patel, 2004). Dalam mengimplementasikannya dapat menggunakan berbagai model praktik tata kelola TI yang telah diperkenalkan secara luas, seperti: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Objective for Information and related Technology (COBIT), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), IT Security, Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST), *The British Standards Institution* (BSI) Baselines, ISO / IEC 27002, ISO / IEC 385000, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya (Haes dkk., 2013). COBIT telah diakui sebagai kerangka kerja yang paling sering digunakan (Coopers, 2008). Hal ini karena efektifitas Framework COBIT.

COBIT telah terus mencapai pengakuan di seluruh dunia sebagai sumber terpercaya untuk tata kelola TI dan audit dan menjadi standar utama untuk mengadopsi dalam menghubungkan proses TI dengan tujuan bisnis (Ramos, 2006). Efektifitas framework ITBSC dan COBIT dibuktikan dalam penelitian yang menggunakan kombinasi cobit dan ITBSC dalam mengevaluasi proyek TI. kombinasi cobit dan ITBSC terbukti sangat efektif dalam melakukan evaluasi (Mamaghani dkk., 2011). COBIT adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan pengelolaan TI yang dikembangkan oleh ISACA, yang berkembang menjadi versi "COBIT 5" saat ini yang diluncurkan pada tahun 2012, dirancang untuk menjadi kerangka terpadu tunggal (ISACA, 2012).

Metode berikutnya adalah Balance Scorecard (BSC) yang telah diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tingkat enterprise. Konsep BSC tersebut diaplikasikan pada fungsi TI (Willsock, 1995). Pada prosesnya kemudian BSC dikembangkan menjadi ITBSC (Grembergen dan Timmerman, 1998). 4 perspektif IT BSC yaitu : Perspektif kontribusi organisasi (*Corporate Contribution*), Perspektif orientasi pengguna (*User Orientation*), Perspektif keunggulan operational (*Operational Excellence*), Perspektif orientasi masa depan (*Future Orientation*). Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Grembergen (2004) yang menghubungkan ITBSC dengan (Business Balance scorecard) BUBSC sebagai instrumen dalam proses penyelarasan bisnis dan strategi TI.

Pemerintah Kota Kupang memiliki bagian yang bertugas untuk mengelola semua data yaitu pada bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE). Bagian PDE dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang membawahi 3 Kasubag yaitu Pengelolaan Data dan Pelayanan Data, Sandi dan Telekomunikasi, Jaringan dan Transmisi Data. Pada bagian PDE memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas akan tetapi belum adanya keselarasan antara proses bisnis dan kebijakan TI pada proses pengolahan data sehingga sampai saat ini belum terdapat sistem informasi atau aplikasi yang digunakan untuk memproses pengolahan data. Hal ini juga berimbas pada arsitektur jaringan yang belum ada pada bagian PDE. Dilihat dari segi kompetensi personel dalam struktur organisasi PDE sudah memadai, jika ditinjau dari kompetensi anggota yang sebagian besar berlatar belakang TI.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia berisi panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional bagi seluruh instansi pemerintah di departemen atau LPND di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kemudian diikuti dengan keluarnya Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2011 yang disusun oleh Tim Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pedoman yang telah ada dapat digunakan sebagai panduan umum dan dasar legalitas, namun best practices dunia lainnya yang telah

ada tetap dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk melengkapi panduan lebih detail seperti dalam pengendalian dan penilaian kinerja seperti COBIT 5.

Melihat pentingnya penerapan tatakelola TI, maka dirasa sangat perlu untuk dilakukannya penilaian tingkat kapabilitas terhadap tatakelola yang telah berjalan. Dalam hal melakukan evaluasi tersebut dibutuhkan pengamatan komprehensif guna menghasilkan Kerangka Kerja Tatakelola TI yang disertai dengan rekomendasi perbaikan sehingga penerapan tatakelola TI dapat berjalan selaras dengan kebutuhan bisnis saat ini maupun yang akan datang.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan Penerapan Tata Kelola TI dengan pendekatan ITBSC dan COBIT 5 melalui tahapan-tahapan penelitian yang telah disusun beserta kerangka kerja COBIT. Penelitian ini diharapkan mampu melakukan kajian evaluatif untuk mengukur tingkat kapabilitas tatakelola TI pada Pemerintah Kota Kupang, kemudian menghasilkan sebuah kerangka tatakelola TI dan Sistem Informasi Tatakelola TI yang sesuai dengan konteks Pemerintah Kota Kupang.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah penerapan sistem informasi analisis tatakelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 5 dan ITBSC yang sesuai dengan konteks Pemerintah Kota Kupang.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memberikan manfaat pengetahuan berupa tatakelola teknologi informasi melalui pendekatan ITBSC dan COBIT 5
2. Sistem informasi analisis tatakelola teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan institusi
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penerapan tatakelola teknologi informasi